



පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව  
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
කිසිම විදිහකින් වහා පහසුකම් සැලසීම (හැඳින්වීම)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)  
ඉහළ මිනිස් කැමැත්ත සහ සහජවිද්‍යා (විද්‍යා) පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව  
Jalan Wibisana Nomor 4 Telepon (0361) 811220 Tabanan  
රජයේ සේවයේ සහ සමාජ සේවයේ සහභාගීත්වය සහ සහජවිද්‍යා පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව  
Website : dpm.d.tabanan.go.id/ email : dpm.d.tabanan@gmail.com  
පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව  
TABANAN 82113

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **Dra. I Gst. Ayu Nyoman Supartiwi, M.Si**  
**Jabatan** : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama** : **Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.**  
**Jabatan** : **Bupati Tabanan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Tabanan



Pihak Kedua  
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M

Dra. I Gst. Ayu Nyoman Supartiwi, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	B
2.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Pengelolaan keuangan yang Baik	Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang Baik dibagi Jumlah Desa dikali Seratus Persen	95%
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat	Jumlah Desa Yang Ada Swadaya Masyarakat dibagi Jumlah Desa dikali Seratus Persen	70%

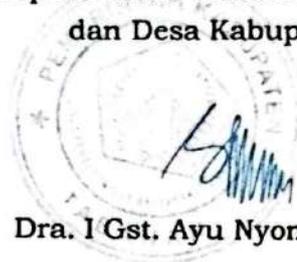
No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penataan Desa	Persentase desa tertib hukum	Jumlah Desa yang sudah memiliki peraturan perundang-undangan dibagi Jumlah Desa dikali Seratus Persen	22%	30.000.000
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	Jumlah Desa yang Sudah Mengirim Laporan Tepat Waktu dibagi Jumlah Desa dikali Seratus Persen	100%	1.371.500.000
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Strata Kelompok-Kelompok Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Desa yang Memiliki Kelompok Lembaga Kemasyarakatan dibagi Jumlah Desa dikali Seratus Persen	100%	2.363.512.900

4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Gungsi Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Peralatan/ Perlengkapan Kantor dibagi Realisasi Kebutuhan Peralatan/ Perlengkapan Kantor dikali Seratus Persen	100%	9.097.649.300
----	---	---	---	------	---------------

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan,



Dra. I Gst. Ayu Nyoman Supartiwi, M.Si

Pihak Kedua

Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

**LAMPIRAN TAMBAHAN**  
**PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABANAN**

<b>I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah</b>						
<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Kinerja Kegiatan</b>	<b>Difinisi Operasional / Formula</b>	<b>Target</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah</b>					
1.	Pojok Desa	Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Online	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi Jumlah Desa dikali Seratus Persen	50%	

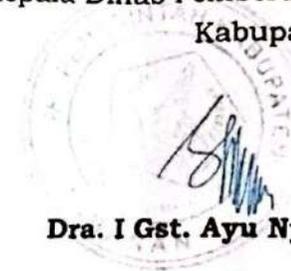
<b>II. Kinerja Wajib</b>						
<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Kinerja Kegiatan</b>	<b>Difinisi Operasional / Formula</b>	<b>Target</b>	<b>Ket</b>
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

<b>III.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS</b> <i>(Lampiran ini khusus dibuat oleh Perangkat Daerah Terkait dari masing-masing Kategori)</i>				
<b>A.</b>	<b>Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah Kebijakan Daerah</b>				
<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah yang Terkait</b>	<b>Kinerja Kegiatan</b>	<b>Difinisi Operasional / Formula</b>	<b>Target</b>	<b>Ket.</b>
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai Keputusan Bupati / DPRD tentang Program Pembentukan Perbup / Perda	2 (1 Perda, 1 Perbup)	

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Tabanan



**Dra. I Gst. Ayu Nyoman Supartiwi, M.Si**

Pihak Kedua

Bupati Tabanan, ↙



**Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.**